

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(Survey Pada Desa Nusa Agung, Desa Nusa Jaya, Desa Nusa Bakti, Desa
Sinumargadi Kecamatan Belitang III)**

SKRIPSI



Nama : Istikomah

NIM : 222016230

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(Survey Pada Desa Nusa Agung, Desa Nusa Jaya, Desa Nusa Bakti, Desa
Sinumargadi Kecamatan Belitang III)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Istikomah

NIM : 222016230

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Istikomah
NIM : 222016230
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Survey pada desa Nusa Agung, Nusa Jaya, Nusa Bakti, dan Senu Marga di Kecamatan Belitang III)

Dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020


Istikomah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Nusa Agung, Desa
Nusa Jaya, Desa Nusa Bakti, Desa Sinumarga Kecamatan
Belitang III Kabupaten Oku Timur)

Nama : Istikomah
NIM : 222016230
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal... 8/02/2020

Pembimbing I

Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si, Ak.C.A
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II

Welly, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., C.A
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto:

- *Selalu ada Allah SWT untuk orang yang selalu mengingat-Nya*
- *Berangkat dengan keyakinan*
- *Berjalan dengan penuh keikhlasan*
- *Istikomah dalam menghadapi cobaan*

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT,

Kupersembahkan kepada:

- *Ayah dan Ibuku tercinta*
- *Kakak dan Ayukku tersayang*
- *Keluarga Besariku*
- *Almamaterku*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kita panjatkankehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan berkat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa (Survey pada desa Nusa Agung, Nusa Jaya, Nusa Bakti, dan Sinu Marga di Kecamatan Belitang III)” penulis bersyukur dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode peneitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab kesimpulan dan saran. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada ayahku Supardi dan ibuku Umiati yang yang tak pernah henti selalu memberikan do’a, menguatkan dan memberikan semangat baik lahir maupun batin. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi,

SE.,M.Si.Ak.CA dan Welly SE.,M.Si yang telah membimbing memberikan bimbingan baik membimbing skripsi ataupun membimbing etika dan memberikan saran serta masukan yang tulus dan ikhlas guna menyelesaikan skripsi ini, selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Palembang
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua program dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Palembang
4. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.CA selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak dan ibu dosen beserta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Palembang
6. Staff di kantor Kecamatan Belitang III dan perangkat desa di empat desa di Kecamatan Belitang III yang dengan tulus membantu dan mengarahkan saya
7. Kakak saya Nur Asiah dan Nur Hasan terimakasih selalu memberi semangat dan dukungan.
8. Sepupu saya Rofiah dan Winda Septiani terimakasih telah menemani didalam suka maupun duka.

9. Teman-teman paket CA.16.2

10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi para pembaca. Aaminn.

2020

Palembang, Februari

Istikomah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	12
1. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	12
a. Pengertian Akuntabilitas	12

b. Indikator Akuntabilitas.....	15
2. Transparansi (<i>Transparancy</i>).....	19
a. Pengertian Transparansi.....	19
b. Pengukuran Transparansi.....	22
3. Partisipasi (<i>Participation</i>).....	24
a. Pengertian Partisipasi.....	24
b. Pengukuran Partisipasi.....	25
B. Kerangka Pemikiran	36
C. Hipotesis	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Operasionalisasi Variabel	44
D. Populasi	46
E. Data yang Diperlukan	47
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Pengujian Data	49
1. Uji Validitas	49
2. Uji Reliabilitas	50
H. Teknik Analisis	51
1. Analisis Statistik Deskriptif	51
2. Analisis Statistik Inferensial	51
a. Uji Asumsi Klasik	52

b. Analisis Regresi Linear Berganda.....	54
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Tingkat Pengembalian Responden	57
2. Profil Responden	58
a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
b. Profil Responden Berdasarkan Usia	58
3. Pengujian Data	59
a. Uji Validitas	59
b. Uji Reliabilitas	63
4. Analisis Data	63
a. Analisis Statistik Deskriptif	63
b. Analisis Regresi Linear Berganda	90
B. Pembahasan Hasil Penelitian	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	107
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1 Dana Desa TA. 2017- 2019.....	8
Table II. 1 Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya	40
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel.....	45
Tabel III. 2 Kriteria Statistik Deskriptif	51
Tabel IV. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	57
Tabel IV. 2 Profil Responden.....	58
Tabel IV. 3 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	59
Tabel IV. 4 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi	60
Tabel IV. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi	61
Tabel IV. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan dana desa.....	62
Tabel IV. 7 Hasil Pengujian Reliabilitas	63
Tabel IV. 8 Hasil Statistik Deskriptif Per Variabel.....	64
Tabel IV. 9 Hasil statistik deskriptif akuntabilitas hukum & kejujuran	66
Tabel IV. 10 Hasil statistik deskriptif indikator akuntabilitas manajerial ...	67
Tabel IV. 11 Hasil Statistik Deskriptif indikator akuntabilitas program.....	68
Tabel IV. 12 Hasil statistik deskriptif indikator akuntabilitas kebijakan	70
Tabel IV. 13 Hasil statistik deskriptif indikator akuntabilitas finansial	71
Tabel IV. 14 Hasil statistik deskriptif indikator informatif.....	72
Tabel IV. 15 Hasil statistik deskriptif indikator keterbukaan.....	73
Tabel IV. 16 Hasil statistik deskriptif indikator pengungkapan.....	74
Tabel IV. 17 Hasil statistik deskriptif indikator pengambilan keputusan	76

Tabel IV. 18	Hasil statistik deskriptif indikator pelaksanaan.....	77
Tabel IV. 19	Hasil statistik deskriptif indikator pengambilan manfaat	78
Tabel IV. 20	Hasil statistik deskriptif indikator evaluasi	79
Tabel IV. 21	Hasil statistik deskriptif indikator perencanaan	81
Tabel IV. 22	Hasil statistik deskriptif indikator pelaksanaan.....	82
Tabel IV. 23	Hasil statistik deskriptif indikator penatausahaan.....	84
Tabel IV. 24	Hasil statistik deskriptif indikator pelaporan	85
Tabel IV. 25	Hasil statistik deskriptif indikator pertanggungjawaban.....	87
Tabel IV. 26	Hasil Uji Multikolinieritas	89
Tabel IV. 27	Hasil Uji Regresi Linear berganda.....	91
Tabel IV. 28	Hasil Koefisien Determinasi akuntabilitas.....	95
Tabel IV. 29	Hasil Koefisien Determinasi transparansi.....	95
Tabel IV. 30	Hasil Koefisien Determinasi partisipasi.....	96
Tabel IV. 31	Hasil Uji t	97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar IV. 1 Hasil Pengujian Normalitas	88
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heterokedastisitas	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 2 Sertifikat Hapalan Surat Pendek
- Lampiran 3 Sertifikat Toefl
- Lampiran 4 Sertifikat BUMDES
- Lampiran 5 Biodata Penulis
- Lampiran 6 Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 7 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 9 Hasil Statistik Deskriptif data penelitian
- Lampiran 10 Pengujian Asumsi Klasik
- Lampiran 11 Hasil Hipotesis Regresi Linear Berganda

ABSTRAK

Istikomah/222016230/2020/ Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa (Survey pada desa Nusa Agung, Nusa Jaya, Nusa Bakti, dan Sinu Marga di Kecamatan Belitang III / Akuntansi Sektor Publik.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu 1) bagaimanakah pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Belitang III; 2) bagaimanakah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Belitang III; 3) bagaimanakah pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Belitang III. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa (Survey pada desa Nusa Agung, Nusa Jaya, Nusa Bakti, dan Sinu Marga di Kecamatan Belitang III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) desa di Kecamatan Belitang III. Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi pengelolaan dana desa. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentansi. Pengujian yang digunakan yaitu uji validitas, uji reabilitas, Uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di 4 (empat) desa di Kecamatan Belitang III, disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan variabel partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

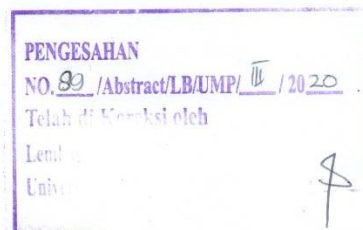
Kata kunci: Pengelolaan dana desa, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.

ABSTRACT

Istikomah/ 222016230/ 2020/ The influence of Accountability, Transparency, and Participation in the Village Fund Management (Survey of Nusa Agung, Nusa Jaya, Nusa Bakti, and Sinumarga villages in Belitang III District/ Public Sector Accounting.

This research was conducted to answer the formulation of the existing problems, in line with 1) how accountability influenced the management of village funds in Belitang III sub-district; 2) how transparency influenced the management of village funds in Belitang III sub-district; 3) how participation influenced the management of village funds in Belitang III sub-district. This research was aimed at determining the influence of accountability, transparency, and participation in the village fund management (Survey of the villages of Nusa Agung, Nusa Jaya, Nusa Bakti, and SinuMarga in Belitang District. The type of the research was an associative research. This research was conducted in 4 (four) villages in Belitang District III. The variables in this study are accountability, transparency, and participation in village fund management. The data used were primary and secondary data. The data collection techniques used in this research were questionnaires and documentation. Validity test, reliability test, classic assumption test and hypothesis test were applied in this research. The techniques for analyzing the data was using multiple linear regression analysis, assisted with assisted by Statistical Program For Special Science (SPSS). The result showed that accountability and transparency no influence toward the village fund management, while the participation variable a influence toward the village fund management.

Keywords: *Village fund management, Accountability, Transparency, and Participation.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 2).

Dana Desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN setiap tahun (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 32).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang Desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan mengacu pada perencanaan dan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan atau konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan dalam anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Penatausahaan keuangan desa dalam melaksanakannya kepala desa harus menetapkan bendahara desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan dalam pengelolaan dana desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali kota, menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota, dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa

setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban, realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Muindro, 2013: 14).

Akuntabilitas yang harus digunakan oleh organisasi sektor publik ada beberapa aspek yaitu: pertama, Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*), adalah akuntabilitas lembaga-lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ketiga, Akuntabilitas program (*program accountability*) lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan lembaga public atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Akuntabilitas publik berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas

tujuannya. Ke empat, akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang diakibatkan. Ke lima, akuntabilitas finansial (*financial accountability*) akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang public (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi (Mahmudi, 2016: 19).

Transparansi (*Transparency*) adalah dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, terjadi adanya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat (Mahmudi, 2016: 13). Transparansi memiliki karakteristik yang harus diperhatikan yaitu, informatif yang merupakan pemberian arus informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat, *openness* atau keterbukaan artinya keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan

pengungkapan *disclouser* merupakan pengungkapan kepada masyarakat atau publik *stakeholders* atas aktivitas dan kinerja finansial.

Participation, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018: 32). Tahap pelaksanaan program partisipasi yaitu, (Solekhan, 2014: 10). Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama, Pelaksanaan yaitu pergerakan sumberdaya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan, Pengambilan manfaat yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai, dan Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Pertanggungjawaban diperlukan dalam pengelolaan dana desa, oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap kepada desa dan aparat pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik tentang desa yang berlaku, tetapi dalam menjalankan tugasnya tidak semua pemerintah desa bertanggungjawab, seperti beberapa kasus yang menimpa para pemerintah

desa. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih dan masalah itu karena formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 Tahun 2015 dinilai tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Informasi yang didapat dari warga Kp. Pabuaran desa Jagabita mengatakan bahwa belum adanya papan pengumuman terkait program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa tidak pernah tampak didepan kantor desa. Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin.

Menurut Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Bambang Soesatyo mengatakan ada tiga aspek permasalahan yaitu aspek perencanaan, aspek pembinaan, dan aspek pengawasan. Aspek perencanaan dana desa belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta belum selaras dengan skala prioritas penggunaan dana desa. “berikutnya belum ada regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa, penyelenggaraan, serta pembinaan aparatur desa,”. Sementara aspek pengawasan, dana desa dinilai belum mencakup evaluasi atas kesesuaian Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBD) dengan skala prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan informasi dari Egi Primayoga (2019), mengatakan mulai dari kompetensi aparat desa yang minim, kurangnya transparansi serta minimnya system pengawasan, pembangunan empat jembatan baru didesa tersebut tak dilakukan, tapi menggunakan material lamanya dan hanya diperbaiki.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitri (2019) menyatakan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan Fitri (2019), penelitian yang dilakukan oleh I Made dan Ni Ketut (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Redi, dkk (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *value for money*. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irna dan Isroah (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *ValueFor Money* Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh dan Ni Made (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi serta partisipasi anggaran berimplikasi positif baik secara parsial maupun simultan pada kinerja anggaran pemerintah kota Denpasar.

Desa Nusa Agung, Nusa Jaya, Nusa Bakti, dan Senu Marga di Kecamatan Belitang III merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi

Sumatera Selatan, potensi untuk membangun kesejahteraan masyarakat masih sangat banyak dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk peningkatan keuangan desa. Dengan potensi yang ada dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dana desa, setiap tahunnya ada penambahan pembangunan yang diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan di empat desa di kec. Belitang III Kabupaten Oku Timur. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan, dan persebaran serta strukturnya.

Tabel I.1
Daftar Dana Desa di Empat Desa di Kecamatan Belitang III
Tahun 2017-2019

No.	Nama Desa	Dana Desa Tahun 2017	Dana Desa Tahun 2018	Dana Desa Tahun 2019
		Anggaran	Anggaran	Anggaran
1.	Nusa Agung	746.231.489,93	647.756.163,00	735.995.261,00
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
		746.231.489,93	647.756.163,00	735.995.261,00
2.	Nusa Jaya	Anggaran	Anggaran	Anggaran
		746.795.082,45	642.096.935,00	740.995.261,00
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
		746.795.082,45	642.096.935,00	740.995.261,00
3.	Nusa Bakti	Anggaran	Anggaran	Anggaran
		752.928.055,56	644.199.488,00	729.506.641,00
		Realisasi	Realisasi	Realisasi

		752.928.055,56	644.199.488,00	729.506.641,00
4.	Sinu Marga	Anggaran	Anggaran	Anggaran
		745.712.933,80	661.579.924,00	762.300.887,00
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
		745.712.933,80	661.579.924,00	762.300.887,00

Sumber: penulis 2020

Berdasarkan data tabel I.1 maka dapat dilihat bahwa pendapatan dana desa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pendapatan dana desa yang diterima diempat desa di Kecamatan Belitang III bersifat fluktuatif atau naik turun.

Berdasarkan informasi dari perangkat desa di Kecamatan Belitang III dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di empat desa belum dilakukan dengan baik karena masih ada desa yang belum dilakukan secara akuntabel, transparansi, dan partisipasi, seperti pemerintah desa belum bisa membuat dan menyajikan laporan pertanggungjawaban secara relevan karena pelaporan dari desa kekecamatan tidak selalu tepat waktu kadang terlambat satu sampai dua hari, masih ada desa melakukan pemasangan papan pengumuman tentang APBDesa dan papan pengumuman terkait program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa, mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat karena masyarakat dianggap belum paham tentang prosedur pengelolaan dana desa. Berdasarkan informasi yang didapat dari berita umum ataupun dari lapangan, pengelolaan dana desa yang baik erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa (Survey pada Desa Nusa Agung, Desa Nusa Jaya, Desa Nusa Bakti, Desa Sinumarga Kecamatan Belitang III).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada empat desa di Kecamatan Belitang III?
2. Bagaimanakah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa pada empat desa di Kecamatan Belitang III?
3. Bagaimanakah pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada empat desa di Kecamatan Belitang III?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada empat desa di Kecamatan Belitang III.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa pada empat desa di Kecamatan Belitang III.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada empat desa di Kecamatan Belitang III.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa khususnya empat desa di Kecamatan Belitang III.

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya empat desa di Kecamatan Belitang III.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikakai*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerinta Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Bambang Soesatyo. 2019. Sidang Paripurna DPR Sebut Ada 3 Masalah Pada Dana Desa. Melalui <https://nasional.okezone.com/read/2019/07/25/337/2083534/sidang-paripurna-dpr-sebut-ada-3-masalah-pada-dana-desa>. Di akses pada 25-07-2019.
- David Wijaya. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Deddi Nordiawan. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dicky Ade. 2019. KPK Ajak Partisipasi Masyarakat Cegah Korupsi Dana Desa. Melalui <https://m.republika.co.id/berita/pwskvv423/kpk-ajak-partisipasi-masyarakat-cegah-korupsi-dana-desa>. Di akses pada 25-08-2019.
- Egi Primayoga. 2019. Ladang Basah korupsi Dana Desa. Melalui <https://beritagar.Id/article/berita/ladang-basah-korupsi-dana-desa>. Di akses pada 02-03- 2019.
- Egi Primayoga. 2019. Dana Desa: Dari Kisah Sukses, Korupsi Hingga Ketimpangan. Melalui https://m.kbr.id/nasional/042019/dana_desa_dari_kisah_sukses_korupsi_hingga_ketimpangan/99089.html. Di akses pada 10-04-2019.
- Fitriya, Abdul,dan Diah. 2019. *Metodelogi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri. 2019. PengaruhTransparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*. Vol. 2 No. 1. Dari <https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/download/120/98/>.
- Febri Diansyah. 2019. Tak Mampu Kelola Anggaran Dana Desa, ICW (Indonesia Coruption Watch) Harap Kapasitas Kades di Tingkatkan. Melalui

<https://bisnis.com/kabar24/read/20191108/16/1168429/tak-mampu-kelola-anggaran-dana-desa-icw-harap-kapasit-kades-ditingkatkan>. Di akses pada 08-11-2019.

- Husein Umar. 2013. *Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Henny, Mulyadi, dan Tri. 2017. Pengaruh Transparansi dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol. 3 No. 2. Dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/download/767/658>
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Irna dan Isroah. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep *Value For Money* Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta. *Jurnal Profita* Edisi 3. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/viewFile/9774/9428>
- I Made dan Ni Ketut. 2019. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 28 No. 1. Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/46487/30197>
- Jan, Hoesada. 2019. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Josef Riwo Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Larasati Medianti. 2018. Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *JOM FEB*. Vol. 1 Edisi 1. Dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/21424/20730>.
- Momuat dan Chandra. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 4 No. 1. Dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12373>
- Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

- Muindro Renyowijoyo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Misbahudin dan Iqbal. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Uii Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Nur dan Bambang. 2018. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ni Luh dan Ni Made. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 18 No. 3. Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/27160/18053>
- Pasal 4 ayat (7) Nomor 37 tahun 2007 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Redi, Marion, dan Husni. 2019. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *value for money* pada pemerintahan di kabupaten Dairi. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*. Vol. 4 No. 1. Dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/download/10157/9188>.
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: penerbit Graha Ilmu.
- Romie, Priyastama. 2017. *Buku Sakti Kuasa SPSS Pengelolaan Data dan Analisis Data*. STRAT UP: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Penerbit Setara Press.

Uma Sekaran. 2019. *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Bab VIII tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal (72). 2014. Dari (<https://www.keuandangesa.info/2016/07/keuangan-desa-dan-aset-desa-.html?m=1>)

V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Warga Desa. 2019. Warga Desa Jagabita Kecewa Pengelolaan Dana Desa TidakTransparan. Melalui <https://mitrapol.com/2019/09/23/warga-desajagabita-kecewa-pengelolaan-dana-desa-tidak-transparan/> . Di akses pada 23-09-2019.

Yuliasyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.